

IMPLEMENTASI GREEN LEADERSHIP PADA ORGANISASI PUBLIK

Andi Heru Susanto¹, Aziz Hakim², Iwan Kurniawan Subagja³

¹Universitas Media Nusantara Citra, Jl. Panjang Blok A8 Green Garden. Jakarta Barat.

²Universitas Krisnadwipayana, Jln Kampus Unkris Jatiwaringin, Pondok Gede.

³Universitas Krisnadwipayana, Jln Kampus Unkris Jatiwaringin, Pondok Gede.

Email: andiherususanto@gmail.com

Article History

Received: 11-01-2025

Revision: 17-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract. This study aims to determine the implementation of green leadership in public organizations, especially Jakarta local government organizations (DKI) by using qualitative methods and triangulation method approaches. The results obtained from the effectiveness of the implementation of green leadership in reducing air pollution in Jakarta are highly dependent on the commitment of the government, community participation, and collaboration between sectors. Green leadership also plays an important role in shaping transportation policies in Jakarta, and in addition to overcoming challenges related to green leadership, collaboration between the government, the community, and the private sector is needed to create a more sustainable and efficient transportation system in Jakarta.

Keywords: Green Leadership, Public Organizations

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari green leadership pada organisasi publik khususnya organisasi pemerintahan daerah (DKI) Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan metode triangulasi. Hasil yang didapat efektivitas implementasi green leadership dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta sangat bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar sektor. Green leadership juga berperan penting dalam membentuk kebijakan transportasi di DKI Jakarta, dan selain itu untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait dengan green leadership maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan efisien di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Green Leadership, Organisasi Publik

How to Cite: Susanto, A. H., Hakim, A., Subagja, I. K. (2025). Implementasi green leadership pada organisasi publik. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 3323-3331. 10.54373/ifijeb.v4i6.2569

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Organisasi publik di Indonesia, seperti instansi pemerintah, BUMN, dan lembaga masyarakat sipil, membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan dan meningkatkan kinerja. Kondisi kepemimpinan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kemajuan di beberapa bidang, terutama dalam perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan peran di tingkat global. Namun, tantangan seperti implementasi kebijakan, korupsi, kesenjangan sosial, dan polarisasi masih perlu diatasi. Penguatan green leadership juga penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kondisi kepemimpinan di Indonesia secara berkala, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan (Laa & Susanto, 2023)

Green leadership adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berperilaku ramah lingkungan dan berkelanjutan (Robbins & Coulter, 2012). Green Leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan dan implementasi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam organisasi. Tujuannya adalah menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Terdapat prinsip-prinsip dari green leadership yaitu; 1) mengurangi dampak lingkungan, 2) menggunakan sumber daya alam secara efisien, 3) meningkatkan kesadaran lingkungan, 4) mengembangkan produk/jasa ramah lingkungan, dan 5) menciptakan budaya organisasi berkelanjutan (Silitonga et al., 2023)

Isu global terkait masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia yakni; perubahan iklim, bencana alam dan kondisi cuaca yang tidak menentu. hal ini disebabkan karena perilaku dan budaya manusia terhadap kelestarian lingkungan, oleh karena itu human resource manajemen dalam hal ini green leadership harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini yaitu dengan menerapkan green sustainable pada organisasi (Prakosa & Wajdi, 2024).

Organisasi sektor publik merupakan salah satu organisasi yang fokus pada pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana abdi negara dalam hal ini pemimpin untuk menjalankan prinsip-prinsip layanan, serta menerapkan atau menciptakan budaya organisasi yang di terima oleh seluruh masyarakat (Amir & Sallatu, 2022). Fenomena pemerintah daerah di Indonesia sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Otonomi daerah dan desentralisasi telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, namun juga menimbulkan tantangan seperti koordinasi antar

tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM, dan tuntutan akuntabilitas publik. Globalisasi dan tuntutan good governance juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara menyeluruh bagaimana implementasi dari green leadership pada organisasi public khususnya organisasi pemerintahan daerah DKI Jakarta.

METODE

Metodologi penelitian kualitatif adalah seperangkat prinsip, strategi, dan teknik yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dan manusia dengan cara yang mendalam dan interpretatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Ia menekankan pada pengumpulan data yang kaya dan deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks, daripada data numerik (Sugiono, 2016). Lokasi penelitian yang dilakukan di pemerintahan DKI Jakarta, dengan menggunakan metode triangulasi yaitu menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif (Denzin & Lincoln, 2011).

HASIL

Mengatasi Permasalahan Lingkungan yang Mendesak

Jakarta menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang mendesak, seperti polusi udara yang tinggi, kemacetan lalu lintas, banjir, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Green leadership bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan di Jakarta membutuhkan penanganan yang serius dan terpadu dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Solusi yang efektif harus didukung oleh kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, partisipasi masyarakat yang aktif, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan (DKI Jakarta, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari informasi yang tersedia. Disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan lingkungan di Jakarta.

Menciptakan Transportasi yang Berkelanjutan

Green leadership mendorong pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, seperti transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, serta penggunaan kendaraan

listrik. Menciptakan transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta merupakan sebuah tantangan sekaligus kebutuhan mendesak. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat telah menyebabkan masalah transportasi yang kompleks, seperti kemacetan parah, polusi udara, dan inefisiensi penggunaan energi. Transportasi berkelanjutan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Laily Rahmawaty, 2020).

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, DKI Jakarta dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya

Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

Green leadership bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di Jakarta, seperti taman kota, hutan kota, dan ruang terbuka hijau lainnya, untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan manfaat sosial dan rekreasi bagi masyarakat. (Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Masyarakat, 2007). Tantangan yang dihadapi adalah minimnya lahan, okupasi lahan, dan kurangnya prioritas terhadap isu RTH dalam kampanye politik. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH di Jakarta demi lingkungan yang lebih baik.

Menerapkan Ekonomi Hijau

Green leadership mendorong penerapan ekonomi hijau di Jakarta, yaitu ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan mendorong inovasi dan investasi di sektor-sektor hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan ekonomi hijau. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. (Pergub No. 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2020-2030, 2021)

Pimpinan di Jakarta telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menerapkan ekonomi hijau. Melalui berbagai kebijakan dan program, Jakarta berupaya untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya ini sejalan dengan komitmen nasional dan global dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Green leadership bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pimpinan di Jakarta,

baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kota, menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan penanganan masalah seperti; 1) Menggalakkan narasi solidaritas dan gotong royong, 2) Membangun ruang partisipasi, 3) koordinasi dan pembagian peran, dan 4) Pendidikan dan literasi. Penting untuk dicatat bahwa tindakan pimpinan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi (Musni Umar, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian diatas dari sumber informasi yang didapat ada beberapa hal yang harus dijalankan dan ditindaklanjuti yaitu:

1. Pengembangan transportasi public, yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah pembangunan MRT, LRT, dan revitalisasi Transjakarta merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan emisi gas rumah kaca.
2. Pengembangan ruang terbuka hijau, yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah pembangunan taman-taman kota dan revitalisasi ruang terbuka hijau merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat.
3. Pengelolaan sampah, yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah Program pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah, merupakan upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
4. Penggunaan energi terbarukan, yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah Pemanfaatan energi surya pada gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
5. Penghargaan Nirwasita Tantra, yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah Jakarta pernah menerima penghargaan Nirwasita Tantra atas kepemimpinan dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

DISKUSI

Efektivitas implementasi green leadership dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta dapat dianalisis melalui beberapa aspek kunci yang mencakup kebijakan, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, dan kolaborasi antar sektor. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan efektivitas tersebut:

1. Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung green leadership, seperti pembatasan kendaraan bermotor, pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan (MRT, LRT, dan Transjakarta), serta penerapan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan. Kebijakan ini bertujuan

untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan mendorong penggunaan transportasi umum.

2. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan: Implementasi sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pengembangan jalur sepeda dan kendaraan listrik, berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik, diharapkan masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang pada gilirannya dapat mengurangi polusi udara.
3. Partisipasi Masyarakat: Green leadership mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kampanye kesadaran lingkungan, program penghijauan, dan inisiatif komunitas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Keterlibatan masyarakat dalam program-program ini dapat memperkuat dampak positif terhadap pengurangan polusi.
4. Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik dan sistem pemantauan kualitas udara yang canggih, dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber polusi dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Inovasi dalam pengelolaan sampah dan pengurangan emisi dari industri juga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara.
5. Kolaborasi Antar Sektor: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengimplementasikan green leadership. Program-program kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi udara.
6. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang diterapkan. Data yang akurat mengenai kualitas udara dan dampak dari kebijakan yang diambil dapat membantu dalam menyesuaikan strategi dan meningkatkan efektivitas implementasi green leadership.
7. Hasil dan Dampak: Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan tetap ada. Polusi udara di Jakarta masih menjadi masalah serius, dan efektivitas implementasi green leadership harus terus dievaluasi. Penurunan tingkat polusi udara dapat dilihat dari data kualitas udara yang menunjukkan perbaikan, tetapi hal ini memerlukan waktu dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Green leadership mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sepeda. Ini termasuk insentif bagi pengguna kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur pengisian yang memadai.

1. Peningkatan Transportasi Umum: Kebijakan transportasi di DKI Jakarta berfokus pada peningkatan sistem transportasi publik, seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi umum, diharapkan masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi.
2. Regulasi Emisi: Green leadership mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait emisi kendaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan mendorong penggunaan kendaraan yang lebih bersih.
3. Keterlibatan Masyarakat: Kebijakan transportasi yang dipengaruhi oleh green leadership juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Melalui konsultasi publik dan program kesadaran, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga untuk kebijakan yang lebih efektif.
4. Kolaborasi Antar Sektor: Green leadership mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi. Kerjasama ini penting untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan transportasi di Jakarta.
5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Implementasi green leadership juga mencakup pemantauan dan evaluasi kebijakan transportasi secara berkala. Data yang diperoleh dari evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Tantangan utama dalam menerapkan kebijakan transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta meliputi kurangnya integrasi antara berbagai moda transportasi, akses yang tidak merata ke layanan transportasi umum, serta masalah infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum dan ketergantungan pada kendaraan pribadi juga menjadi hambatan signifikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. Kurangnya Integrasi Moda Transportasi: Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, masih terdapat kesenjangan dalam sistem tarif dan konektivitas antar moda. Hal ini menyulitkan pengguna untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya dengan mudah.
2. Akses yang Tidak Merata: Layanan transportasi umum belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta, terutama di daerah pinggiran. Banyak masyarakat yang tinggal jauh dari halte atau stasiun, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencapai titik transportasi umum, yang membuatnya kurang terjangkau.

3. **Infrastruktur yang Belum Memadai:** Infrastruktur transportasi yang ada masih perlu ditingkatkan, termasuk jalan, trotoar, dan fasilitas untuk pejalan kaki. Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik diperlukan untuk mendukung penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
4. **Resistensi Masyarakat:** Banyak masyarakat yang masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih nyaman dan cepat. Perubahan perilaku ini memerlukan waktu dan upaya edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat transportasi umum.
5. **Ketergantungan pada Kendaraan Pribadi:** Biaya perjalanan yang rendah dengan kendaraan pribadi membuat banyak orang enggan beralih ke transportasi umum. Untuk mengurangi emisi dan kemacetan, perlu ada kebijakan yang mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.
6. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengembangan transportasi berkelanjutan juga menjadi tantangan. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi kebijakan yang direncanakan bisa terhambat.
7. **Kebijakan yang Tidak Konsisten:** Kebijakan transportasi yang sering berubah atau tidak konsisten dapat membingungkan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem transportasi umum. Stabilitas dalam kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi green leadership dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta sangat bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar sektor. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas udara di Jakarta. Green leadership berperan penting dalam membentuk kebijakan transportasi di DKI Jakarta dengan fokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan kesehatan lingkungan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan efisien di DKI Jakarta.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil tersebut maka rekomendasi yang bisa kami berikan terutama untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan yaitu: 1) Perkuat kebijakan insentif dan disinsentif, 2) Integrasi kebijakan transportasi, 3) Perluas zona rendah emisi, 4) Terapkan standar emisi

yang ketat, 5) Kebijakan pengadaan kendaraan ramah lingkungan. Sedangkan rekomendasi untuk masyarakat yang mendapat dampak secara langsung yaitu: 1) Kampanye edukasi yang intensif yakni melakukan kampanye edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya transportasi berkelanjutan dan dampak negatif polusi udara bagi kesehatan. Libatkan berbagai media dan platform, termasuk media social, 2) Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi yakni memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan, misalnya melalui forum diskusi, survei, dan konsultasi publik.

REFERENSI

- Amir, D. A., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Melayani Terhadap Motivasi Bawahan Dalam Melayani Publik: Peran Mediasi Personaliti Agreeableness (Studi Pada Organisasi Publik Di Indonesia). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 29(1), 52–65.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- DKI Jakarta. (2022). *Kebijakan Jakarta Hijau*. Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta.
- Laa, N. A. M., & Susanto, A. H. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bpr Tanaoba Lais Manekat. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 206–223.
- Laily Rahmawaty. (2020). STA 2021 dan Transportasi berkelanjutan di Jakarta. *Antara News*.
- Musni Umar. (2012). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Untuk Membangun Jakarta Baru. *Detiknews*.
- Pergub No. 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2020-2030 (2021).
- Prakosa, I. A., & Wajdi, M. F. (2024). Pengaruh Green Human Resource Management, Green Transformational Leadership, dan Green Organizational Culture Terhadap Green Employee Behavior pada PT Shinta Konveksi di Boyolali. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4730–4745.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Manajemen*. Salemba Empat.
- Silitonga, D., Silalahi, M., Andayani, S., Ilyas, M., Palupi, S. M., Saragih, R. I. E., Hertati, L., Harahap, L. R., Syaifullah, D. H., & Dewi, I. C. (2023). *GREEN LEADERSHIP: Kepemimpinan untuk Tata Kelola Berkelanjutan*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Masyarakat (2007).